

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR**

SKRIPSI



OLEH :

YANA WULANDARI NATSIR

A 311 08 971

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang menggenggam jantung ini dan membiarkannya tetap berdetak, mengalirkan nyawa dalam tubuh sehingga satu demi satu ibadah yang diberikan-Nya dapat peneliti laksanakan. Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Adapun judul skripsi ini adalah ***“Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Kas pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar”***.

Skripsi ini saya dedikasikan sepenuhnya kepada kedua orangtuaku tercinta Drs.H.M.Natsir Taba, MM dan Hj.Mulyana Natsir. Terima kasih bapak dan ibu untuk semua kasih sayang, doa yang tak pernah putus, pengorbanan, serta dukungan yang sangat besar untuk ananda. Tak hanya cukup hanya sekedar “terima kasih” untuk membasuh keringat dan tetesan air mata yang mengalir selama membesarkan ananda. Namun percayalah dalam setiap hembusan nafas ini adalah doa memohon surga jadi balasan termanis bagi jasa pahlawanku Bapak dan Ibu Tersayang.

Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak berupa dukungan moril, materil dan spiritual. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof.DR.Muhammad Ali, SE,MS beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagikan ilmunya.
2. Bapak DR.H.ABD Hamid Habbe, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dra.Hj.Nirwana, M.si,Ak selaku Pembimbing I dan Bapak Drs.M.Natsir Kadir, M.si,Ak selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs.Muallimin,M.Si selaku Penasehat Akademik yang banyak membantu peneliti selama menyelesaikan kuliah.
5. Bapak DR.Muh.Idrus Taba, SE.M.Si yang telah banyak membantu peneliti selama menyelesaikan kuliah.
6. Seluruh pegawai akademik dan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya buat Pak Aso, Pak Tarru, Pak Asmari, Pak Haris, Asri, Dandhu terima kasih atas kebaikannya.
7. Saudara-saudaraku Muhammad Yasser Natsir,SE., Muhammad Yudhistira Natsir,S.IP., Muhammad Yusri natsir, SE., Andi Restu Mappewali,S.IP dan Sepupuku Andi Hasmayanti,SE.M,Si., Andi Hilal, dan Murni Indrayani,SE., yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil, serta terima kasih atas semua doa dan semangat yang telah mewarnai hari-hari peneliti.

8. Patta Intang dan Patta Gau yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil serta terima kasih telah sabar menghadapi sifat ananda ini yang agak sedikit bandel dan tidak tahu aturan.
9. Sodara-Sodara seperjuangan dibangku kuliah yang telah memberikan warna dan cerita, pahit manis kita lalui bersama Winda, Asni, Tesy, Cristy, Sisy, Dewi, Besse, Wulan. Serta Azizah Syarif, SE., selaku pembimbing kompre terbaik dan tersabar.
10. Teman-teman 2008 Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya teman-teman 08STACKLE yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas semua bantuan, doa, dan dukungannya.
11. Sodara-sodara KKN ku Rory, Asri, Inna, Julie, k'Nining, Dwi, Handri, yang telah memberikan banyak keceriaan selama ini.

Sebagai manusia yang penuh kekurangan, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik isi maupun bahasanya walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Kritik dan Saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semua berakhir dalam harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin

Makassar, 8 Mei 2013

Yana Wulandari Natsir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Sistem Akuntansi	7
B. Pengertian Kas.....	8
C. Laporan Realisasi Anggaran.....	12
1. Sistem Penerimaan Kas.....	14
2. Sistem Pengeluaran Kas	15
D. Sistem Pengendalian Internal	16
E. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008	23
F. Konsep Dasar Sistem Pengendalian Internal.....	29
G. Elemen-elemen Sistem Pengendalian Internal Kas.....	30
BAB III. METODE PENELITIAN	

A. Lokasi Penelitian	35
B. Metode Pengumpulan Data	35
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Metode Analisis	37
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar	43
B. Dasar Hukum Pembentukan Dinas PPKAD.....	45
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas PPKAD	47
BAB V. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Penerapan SPI (Sistem Pengendalian Internal).....	56
1. Lingkungan Pengendalian.....	57
2. Penilaian Resiko.....	58
3. Kegiatan Pengendalian.....	59
4. Informasi Dan Komunikasi	61
5. Pemantauan	61
B. Sistem Dan Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran	62
1. Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas	64
2. Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas	68
C. Pengendalian Internal Kas	73
1. Sistem Penerimaan Kas	73
2. Sistem Pengeluaran Kas	74
3. Evaluasi.....	75
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran – Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR GAMBAR

	Hal
GAMBAR : Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi sebuah daerah di era global menuntut pemerintah daerah mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, agar tujuan pemerintah daerah tersebut dapat tercapai diperlukan suatu sistem pengendalian keuangan yang dapat mengatur segala sesuatu berkaitan dengan segala kegiatan-kegiatan pemerintah daerah supaya lebih baik. Sehingga dalam upaya pencapaian pembangunan nasional yang diarahkan pada pencapaian kehidupan masyarakat adil dan makmur, merata materiil dan spritual maka pembangunan di segala bidang kehidupan direncanakan mulai dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada hakikatnya merupakan pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari daerah tersebut. Selain itu, pemberian otonomi kepada daerah dan kota juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya.

Pola pertanggungjawaban daerah atas pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan, dari pola pertanggungjawaban yang lebih bersifat vertikal kepada pemerintah di atasnya menjadi pertanggungjawaban yang lebih bersifat horizontal kepada masyarakat didaerah tersebut. Dengan pola pertanggungjawaban horizontal kepada publik, pemerintah dalam hal ini pimpinan daerah, dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah dengan efektif

dan efisien. Selain itu tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas selalu ditujukan kepada pihak manajemen pemerintah. Oleh karenanya, perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan dengan baik, terutama dalam aspek anggaran, sistem akuntansi dan pemeriksaan.

Dengan pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, dibutuhkan suatu sistem akuntansi agar segala transaksi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan dan pertanggungjawabannya dapat diidentifikasi, dicatat, dianalisis, dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu, sistem tersebut dirancang dan dibuat juga untuk menghasilkan pengendalian internal. Sistem akuntansi harus dapat memberikan bentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi organisasi hingga pelaporannya. Dengan menaati semua prosedur yang telah ditetapkan berarti pengendalian juga telah dilakukan.

Sistem akuntansi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengendalian internal terhadap semua kegiatan agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan. Selain harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam waktu sesingkat mungkin, sistem akuntansi yang disusun harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Oleh karenanya, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengendalian internal.

Dalam setiap transaksi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan, sebagian besar melibatkan kas, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas. Kas merupakan aktiva yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu organisasi yang

berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut. Selain itu, kas juga mempunyai kegunaan yang universal dan merupakan kertas kecil yang mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan kas selalu menjadi sasaran empuk bagi penggelapan atau kecurangan.

Pemerintah daerah harus dapat merancang dan membuat suatu sistem dan prosedur akuntansi terhadap kas yang dapat mengurangi resiko terjadinya penggelapan dan penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, mengingat kas organisasi seperti yang ada pada pemerintah daerah tidak lain adalah milik masyarakat yang harus dapat dijamin keberadaannya. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap perancangan, pembuatan, dan perbaikan sistem dan prosedur akuntansi kas yang dimilikinya.

Pada setiap Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah membutuhkan sarana pengendalian internal agar seluruh kegiatannya terarah kepada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Salah satu sarana yang dapat digunakan manajemen untuk mengarahkan anggota organisasinya di dalam bidang keuangan adalah pengendalian internal terhadap kas, baik sistem dan prosedur penerimaan maupun sistem dan prosedur pengeluaran

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka kebutuhan sistem pengendalian internal sangatlah diperlukan. Sistem pengendalian internal tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Dengan demikian, diharapkan sistem pengendalian internal tersebut dapat berfungsi

sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur penyajian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Pengembangan unsur sistem pengendalian internal perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

Sistem pengendalian intern tersebut dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Dengan demikian unsur sistem pengendalian intern tersebut, meliputi :

- a. Lingkungan pengendalian.
- b. Penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian.
- d. Informasi dan komunikasi.
- e. Pemantauan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah tulisan dengan judul "**Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Apakah sistem pengendalian internal kas pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berjalan dengan baik, ditinjau dari unsur sistem pengendalian internal yang baik, meliputi : Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, apakah sistem pengendalian internal kas pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Sistem Pengendalian Internal yang meliputi : Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan peraturan sistem pengendalian internal menurut Peraturan dan Ketentuan yang berlaku

- b. Bagi penulis, sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang terkait dengan materi penulisan.
- c. Dari hasil pembahasan tulisan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dapat mengambil manfaat untuk lebih meningkatkan pengendalian internal terhadap pengelolaan kasnya.
- d. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya sebagai media pustaka dan perbandingan pembaca atau peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sistem Akuntansi

Defenisi sistem menurut W. Gerald Cole adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Sedangkan Steven A. Moscovice mendefinisikan sistem adalah suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Baridwan,2002;4).

Sistem diperlukan dalam suatu organisasi atau pemerintahan agar pelaksanaan pekerjaan dapat terstruktur dan tersusun sehingga transaksi-transaksi yang terjadi berjalan sesuai dengan prosedur. Setiap organisasi memerlukan sistem akuntansi atas kegiatan yang dilakukan. Sistem akuntansi berguna untuk menyediakan informasi akuntansi yang membantu manajemen dalam mengelola dan menyediakan organisasi yang dipimpinnya. Sistem akuntansi kas dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi yang diterapkan dalam mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas.

Sistem Akuntansi menurut Hadibroto (1980:5), mendefinisikan sebagai berikut:

“Sistem akuntansi adalah keseluruhan prosedur dan teknik, yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengolahnya sehingga

terdapat informasi maupun alat untuk pengawasan”.

Menurut Mulyadi (1997:3), sistem akuntansi didefinisikan sebagai berikut:

"Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.

Menurut Bastian dan Soepriyanto (2002:3), sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi akuntansi”.

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu organisasi formulir, catatan, prosedur, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna dalam pengelolaan dan pengendalian organisasi. Sistem akuntansi dapat memudahkan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pengawasan terhadap apa yang telah dilaksanakan.

B. Pengertian Kas

Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sebab hampir seluruh kegiatan organisasi mempengaruhi kas, baik penerimaan maupun pengeluaran kas. Kas juga merupakan aktiva yang paling likuid, sehingga ditempatkan pada elemen pertama yang nampak di neraca dalam suatu organisasi.

Kas menurut Donald E.Kieso, Jerry J.Weygant dan Warfield (2001 : 402) yang diterjemahkan oleh Herman Wibowomenyatakan bahwa :

“Kas yaitu aktiva yang paling likuid, merupakan media pertukaran standard dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya.”

Sedangkan pengertian kas menurut Soemarso S.R (2004 : 296)menyatakan bahwa :

“Dari segi akuntansi yang dimaksud dengan kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang/bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya.”

Definisi Kas menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002:85) adalah sebagai berikut:

"Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan."

Definisi Kas menurut Baridwan (2003:85) adalah sebagai berikut:

"Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar, dalam artian kas adalah yang paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas".

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kas adalah alat pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya, juga simpanan bank atau tempat lain yang dapat di ambil sewaktu-waktu.

Di dalam suatu organisasi atau perusahaan diperlukan adanya kegiatan transaksi-transaksi keuangan, baik itu pada perusahaan maupun pemerintahan. Transaksi-transaksi ini dimaksudkan sebagai informasi arus kas yang berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Arus kas merupakan suatu proses pergerakan dana tunai masuk dan keluar dari suatu bisnis perusahaan. Arus kas bersih dapat ditentukan dengan melakukan pengukuran perubahan yang terjadi di dalam neraca suatu perusahaan pada masa tertentu.

Ada beberapa pengertian laporan arus kas yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :

Menurut Kieso dan Weygant (2005:235), dinyatakan bahwa :

“Laporan arus kas adalah yang melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktifitas operasi, investasi dan pendanaan dari suatu perusahaan selama suatu periode dalam suatu format yang merekonsiliasi saldo kas awal dan saldo kas akhir”.

Menurut PSAK (No.2:2007:5)dinyatakan bahwa :

“Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan”.

Menurut Fess, Niswonger, Reeve, Warren (2005:44), dinyatakan bahwa:

“Arus kas adalah salah satu dari laporan keuangan dasar yang berguna bagi manajemen dalam mengevaluasi operasi masa lalu dan dalam merencanakan aktifitas investasi serta pembiayaan dimasa depan laporan ini berguna bagi para investor, kreditor dan pihak lainnya dalam menilai potensi laba perusahaan. Laporan arus kas (statement of cash flow) melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan selama satu periode”.

Dari beberapa defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas merupakan laporan yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan selama satu periode dari aktifitas operasi, investasi dan pendanaan yang dapat membantu pemakai untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. Arus kas juga merupakan indikator yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengetahui posisi keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Selain itu laporan arus kas dapat menjadi bahan evaluasi atas transaksi yang telah terjadi sebelumnya dan menjadi ukuran untuk transaksi yang akan dilaksanakan ke depan.

Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas suatu entitas selama periode tertentu. Tujuan lain adalah memberikan informasi kepada kreditor, investor dan pemakai lainnya dalam :

1. Menentukan kemampuan perusahaan untuk menimbulkan arus kas bersih positif dimasa yang akan datang.
2. Menentukan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajibannya

seperti melunasi hutang kepada kreditor.

3. Menentukan alasan tentang terjadinya perbedaan antara laba bersih dan dihubungkan dengan pembayaran dan penerimaan kas.
4. Menentukan pengaruh transaksi kas pembelanjaan dan investasi bukan kas terhadap posisi keuangan perusahaan.

Laporan arus kas melaporkan arus kas melalui tiga jenis transaksi :

1. Arus kas dari aktivitas operasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih.
2. Arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dari aktiva lancar.
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan utang perusahaan.

C. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtiar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum Negara/Bendahara umum Daerah Yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih Dalam Periode tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang atau entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran

pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus atau Defisit
- e. Penerimaan Pembiayaan
- f. Pengeluaran Pembiayaan
- g. Pembiayaan Neto
- h. SILPA/SIKPA

1. Sistem Penerimaan Kas

Semua transaksi yang terjadi yang masuk dan menyebabkan bertambahnya kas disebut penerimaan kas. Penerimaan kas mempengaruhi saldo kas baik berasal dari penjualan produksi, penerimaan piutang, maupun transaksi lain yang menyebabkan saldo meningkat.

Definisi Penerimaan Kas menurut (Mulyadi: 2001:500) adalah :

"Suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan maupun pemerintah."

Definisi Penerimaan Kas menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2004:03) sebagai berikut:

"Semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara atau Daerah."

Pengertian penerimaan kas menurut Soemarso S.R (2004 : 172) mengemukakan bahwa :

“Penerimaan kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan bertumbuhnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya penjualan hasil produksi, penerimaan piutang maupun hasil transaksi lainnya yang menyebabkan bertambahnya kas.”

Sedangkan penerimaan kas menurut H. Kusnadi (2000 : 61) adalah sebagai berikut :

“Penerimaan kas pada umumnya meliputi penerimaan via pos (mail receipt), penjualan tunai (cash sales) dan penerimaan piutang (collection of receivable), disamping penerimaan rutin, masih ada lagi penerimaan lainnya yaitu penerimaan yang tidak rutin, misalnya penerimaan uang dari penjualan.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan kas adalah bertambahnya saldo akibat adanya transaksi berupa penjualan produk, penerimaan piutang, ataupun transaksi lain. Pencatatan yang dilakukan terhadap penerimaan kas dapat membantu organisasi atau pemerintahan mengontrol penerimaan sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan anggaran.

2. Sistem Pengeluaran Kas

Semua transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo akibat transaksi yang terjadi berupa pembayaran baik kontan maupun kredit untuk kelancaran operasional perusahaan disebut pengeluaran kas.

Definisi Pengeluaran Kas menurut Mulyadi (2001:543) sebagai berikut:

"Suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan."

Definisi Pengeluaran Kas menurut Depdiknas (2003:535) adalah sebagai berikut:

"Suatu proses, cara, perbuatan mengeluarkan alat pertukaran yang diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat-tempat lainnya yang dapat diambil sewaktu-waktu."

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran Kas adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk melaksanakan pengeluaran kas baik dengan cek maupun uang tunai untuk suatu kegiatan perusahaan maupun pemerintah.

D. Sistem Pengendalian Internal

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 menyebutkan bahwa; Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut disebutkan bahwa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disamping itu, disebutkan pula bulan. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan Audir, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan, tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepentingan yang baik. Sistem Pengendalian Intern ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Suatu organisasi didirikan karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka seluruh elemen dalam organisasi harus dimotivasi dan diarahkan agar dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Tindakan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi disebut sebagai pengendalian.

Definisi pengendalian menurut Widjajanto (1989:167) adalah sebagai berikut:

"Pengendalian adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengusahakan agar aktifitas dapat berjalan selaras dengan perencanaan dan mengarah pada sasaran yang ditetapkan".

Sedangkan definisi pengendalian menurut Kosasih (1993:78) sebagai berikut:

"Pengendalian (*control*) adalah proses pelaksanaan dari suatu pengaruh untuk mengarahkan kegiatan suatu objek, organisasi, atau sistem".

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau usaha untuk membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan untuk mengoreksi perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar tujuan perusahaan dapat terjadi.

Pengendalian dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan sehingga tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat

tercapai. Pengendalian dapat dibagi dalam dua bagian yaitu pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Dalam penelitian kali ini, peneliti membatasi hanya pada pengendalian internal organisasi. Pengendalian internal merupakan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen untuk menjamin segala aktivitas sesuai dengan prosedur dan kebijakan manajemen.

Definisi pengendalian internal dalam buku standar profesional Akuntan Publik (2001) (SA.319:2) adalah :

"Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisariat, manajemen dan personel lain dengan entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang tiga golongan tujuan berikut ini: (a)keandalan laporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, (c)kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku".

Pengertian Pengendalian Internal yang dikemukakan oleh Baridwan (2002:97) adalah sebagai berikut:

"Pengendalian internal adalah meliputi rencana organisasi dan metode serta kebijaksanaan yang terkoordinir dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercayai, menggalakkan efisiensi usaha dan dapat mendorong ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang telah digarisbawahi".

Sedangkan pengertian pengendalian internal yang dikemukakan oleh Hartanto (2002:51) adalah sebagai berikut:

"Pengendalian Internal adalah suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi atau mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian ini pengawasan meliputi struktur organisasi, formulir-formulir dan prosedur-prosedur pembukuan dan laporan (*administrasi budget on standard*, pemeriksaan intern dan sebagainya)".

Beberapa defisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu sistem yang meliputi semua metode dan peraturan sederajat yang digunakan oleh manajemen untuk mengawasi atau mengendalikan aktivitas organisasi agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengendalian internal dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *Internal Check*. American Institute Of Certified Public Accountant (AICPA) mendefinisikan *internal check* sebagaimana yang dikutip oleh Cecil Gillespie(2001:187) sebagai berikut:

"...an accounting device where by a proof of the accuracy of figures can be obtained through the expedient of having different persons arrive in dependently as the same result."

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa internal cek adalah suatu teknik akuntansi yang bertujuan untuk membuktikan ketepatan data-data akuntansi dengan membandingkan pekerjaan antara orang-orang yang berbeda, dimana mereka bekerja secara independen untuk suatu transaksi yang sama.

American Instute of Certified Public Accuntant (AICPA) (2002:37) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal sebagai berikut:

"Struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen".

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:163) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal sebagai berikut:

"Struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,mengecek ketelitian dan keandalan

data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen."

Sistem Pengendalian Internal Kas dalam penelitian ini diartikan sebagai struktur organisasi, sistem dan prosedur yang diterapkan dalam organisasi atas kas dengan tujuan melindungi kas organisasi, memeriksa kecermatan dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang sudah digariskan oleh organisasi.

Tujuan Pengendalian Internal sesuai beberapa pengertian di atas meliputi:

1. Melindungi harta milik organisasi.

Dengan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan, diharapkan dapat menjamin terlindunginya harta organisasi.

2. Mengecek kebenaran data akuntansi

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain dilakukan dengan melaksanakan pencatatan akuntansi yang baik. Dengan pencatatan akuntansi yang baik, informasi yang dihasilkan dapat terjamin keandalan dan relevansinya. Selain itu, manajemen dapat membandingkan ketepatan data-data akuntansi dengan orang-orang yang berbeda, dimana mereka bekerja secara independen untuk suatu transaksi yang sama.

3. Mendorong efisiensi dalam operasi

Pengendalian internal diharapkan dapat mendorong efisiensi operasi organisasi dengan mengadakan evaluasi dan perbaikan secara periodik dan terus-menerus.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dengan ditetapkannya sistem pengendalian internal organisasi, manajemen dapat mengecek kesesuaian aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kebijakan manajemen, serta melakukan tindakan yang diperlukan apabila tidak terjadi kesesuaian antara aktivitas yang dilakukan dengan kebijakan manajemen.

Pengendalian internal dibagi ke dalam dua bagian yaitu:

1. Pengendalian Administrasi, meliputi organisasi, prosedur, dan catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang mengarah kepada otorisasi manajemen atas suatu transaksi. Otorisasi manajemen merupakan titik pangkai atau titik utama dari pengendalian manajemen.
2. Pengendalian Akuntansi, meliputi organisasi semua formulir, catatan, prosedur dan laporan keuangan untuk mengamankan harta organisasi dan memberikan jaminan dicapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengendalian ini harus disusun sedemikian rupa, sehingga memberikan jaminan yang memadai bahwa:
 - a. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi manajemen.
 - b. Transaksi dibukukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan:
 - 1) Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pertanggungjawaban atas aktiva organisasi, dan

- 3) Pertanggungjawaban pencatatan akuntansi aktiva dibandingkan dengan aktiva yang ada dalam jangka waktu tertentu dan bila ada selisih diambil tindakan penyelesaian.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Salah satu upaya dalam penciptaan pemerintahan yang baik tersebut, antara lain adalah melalui penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan negara, yaitu melalui paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara tersebut, membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat

dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Berkaitan dengan adanya tuntutan komitmen, peran dan tanggung jawab pimpinan dalam implementasi sistem pengendalian intern tersebut, Pasal 4 PP 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam lingkungan kerjanya, melalui: (1) penegakan integritas dan nilai etika; (2) komitmen terhadap kompetensi; (3) kepemimpinan yang kondusif; (4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; (5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; (6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; (7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan (8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Sedangkan terkait dengan substansi pengendalian, Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Pada Ayat (2) disebutkan pula bahwa penyelenggaraan kegiatan pengendalian tersebut sekurang-kurangnya memiliki karakteristik

sebagai berikut: (a) kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; (b) kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; (d) kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; (e) prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan (f) kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Selanjutnya pada Ayat (3) menyebutkan bahwa kegiatan pengendalian meliputi: (1) reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; (2) pembinaan sumber daya manusia; (3) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; (4) pengendalian fisik atas aset; (5) penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; (6) pemisahan fungsi; (7) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; (8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; (9) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; (10) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan (11) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Terkait dengan Pasal 18 Ayat (3) butir (2) pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia. Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya: (a) mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai; (b) membuat strategi

perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan (c) membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Dari beberapa ketentuan mengenai implementasi sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana telah disebutkan diatas, maka pengendalian internal pada hakekatnya merupakan fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh setiap pimpinan. Dengan terselenggaranya aktivitas pengendalian internal, maka instansi pemerintah diyakini akan dapat: (a) mencegah dan mendeteksi terjadinya korupsi; (b) mendeteksi dan mengungkapkan fakta serta menindaklanjuti penyimpangan; (c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; serta (d) meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara signifikan.

Sesuai bunyi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu :

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) SPIP terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan

- e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua : Lingkungan Pengendalian Pasal 4

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Dimana komponen-komponen SPIP terdiri atas:

- a. Lingkungan pengendalian.

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan

perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat, untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

1. Penegakan integrasi dan nilai etika.
 2. Komitmen terhadap kompetensi.
 3. Kepemimpinan yang kondusif.
 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan .
 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia .
 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif,dan
 8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait
- b. Penilaian risiko.

Pengendalian Intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko dengan menetapkan tujuan instansi pemerintah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan yang dimaksud harus spesifik terukur, dapat dicapai realistis dan terikat waktu yang dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dengan menetapkan strategi operasional yang konsisten serta strategi operasional yang konsisten serta strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

- c. Kegiatan pengendalian.

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan

Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian harus dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

d. Informasi dan komunikasi.

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan, Instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawab.

e. Pemantauan.

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern, maka dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPI (Sistem Pengendalian Internal)

F. Konsep Dasar Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO Report (1994;5), Konsep dasar internal terdiri dari :

1. a continuous built-int component of operation

Unsur yang melekat sepanjang kegiatan dimana pengendalian internal adalah rangkaian kegiatan yang secara terus menerus dan tidak terpisahkan dari setiap sistem yang digunakan manajemen untuk

mengatur dan mengarahkan kegiatannya dalam suatu organisasi.

2. effected by people

Dilakukan oleh manusia yang merupakan unsur terpenting dan yang mengakibatkan pengendalian intern berfungsi. Pengendalian internal yang baik merupakan tanggung jawab pimpinan karena dialah yang menentukan tujuan, menetapkan mekanisme dan kegiatan pengendalian, memantau dan mengevaluasi pengendalian. Berfungsinya pengendalian internal tidak terlepas dari peran seluruh personil disetiap level dalam organisasi.

3. Provide reasonable assurance not absolute assurance

Memberikan jaminan yang memadai, bukan jaminan yang mutlak kepada dewan direksi dan manajemen.

G. Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Internal Kas

Dalam menilai seberapa besar kesesuaian antara sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan dengan konsep pengendalian internal kas menurut teori yang digunakan dalam penelitian ini, sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan akan dibandingkan dengan beberapa indikator yang merupakan elemen sistem pengendalian internal terhadap kas, yang diambil dari beberapa penulis.

Unsur pokok sistem pengendalian internal yang digunakan adalah struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, dan praktek yang sehat. Hal ini sesuai dengan pendapat Bastian dan Soepriyanto (2002:204) tentang unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri

dari :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
3. Praktik sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang kualitasnya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Unsur sistem pengendalian internal karyawan yang kualitasnya sesuai dengan tanggung jawabnya tidak dimasukkan dalam pengukuran ini. Hal ini disebabkan kesulitan bagi penulis dalam menilainya, yang memerlukan keahlian khusus dan waktu yang lebih panjang.

Untuk menghindari adanya kecurangan terhadap kas, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2003:100) menyatakan perlunya sistem pengendalian internal atas kas. Agar kecurangan kas dapat ditekan sekecil mungkin, maka diperlukan sistem pengawasan kas antara lain :

1. Diadakan pembagian tugas antara fungsi penerimaan, pencatatan dan penyimpanan kas.
2. Penyimpanan kas harus segera disetor ke bank.
3. Digunakan sistem voucher, untuk menjamin bahwa pengeluaran-pengeluaran memang untuk kepentingan perusahaan.
4. Diadakan perhitungan kas (*cash opname*).

5. Disusun rekonsiliasi bank secara periodik.
6. Diselenggarakan dana kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya kecil."

Menurut Jusup (2005:4) agar dapat menghasilkan pengendalian internal yang kuat suatu sistem akuntansi perlu mempunyai :

1. Penetapan tanggung jawab secara jelas.
2. Penyelenggaraan pencatatan yang memadai.
3. Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva.
4. Pengasuransian kekayaan dan karyawan organisasi.
5. Pemisahan tanggungjawab atas transaksi yang berkaitan.
6. Penggunaan peralatan mekanis (jika memungkinkan).
7. Bagan perkiraan (*chart of accounts*) yang digolong-golongkan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing yang terdapat dalam struktur organisasi perusahaan.
8. Pedoman (*manual*) kebijakan dan prosedur akuntansi yang dijalankan dalam perusahaan.
9. Sistem anggaran yang memadai.
10. Pelaksanaan pemeriksaan secara independen.

Dalam buku Sistem Akuntansi yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991:364) memberikan contoh elemen-elemen sistem pengendalian internal sebagai berikut:

1. Organisasi
 - a. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
 - b. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan

sendiri oleh Bagian Kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari unit organisasi yang lain.

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

- a. Penerimaan kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang.
- b. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang.
- c. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- d. Pencatatan dalam jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran kas (atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek) harus ada otorisasi yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

3. Praktek Yang Sehat

- a. Saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.
- b. Untuk mencegah penggunaan lebih dari satu kali dokumen-dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas, dokumen dasar dan pendukungnya harus dibubuhi cap "lunas" oleh Bagian Kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan.
- c. Penggunaan rekening koran bank (*bank statment*), yang merupakan informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh unit organisasi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas (Bagian Pemeriksa Intern).

- d. Semua pengeluaran kas harus dilakukan atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan memindahbukuan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memperoleh kepastian bahwa uang yang dikeluarkan ini sampai ke alamat yang dituju (tidak ke tangan pribadi penagih).
- e. Jika pengeluaran kas hanya mengangkut pengeluaran yang kecil, pengeluaran ini dilakukan lewat dana kas kecil, yang akuntansinya diselenggarakan dengan sistem imprest.
- f. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan.
- g. Kas yang ada di tangan (*cash in safe*), kas yang ada diperjalanan (*cash intransit*) diasuransikan dari kerugian.
- h. Kasir diasuransikan (*fidelity bond insurance*).
- i. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan (misalnya mesin register kas, almari besi, dan *strong room*).
- j. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh Bagian Kas.